
**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PEMBERIAN DAN
PELUNASAN PIUTANG PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN)
BAHTERA BITUNG**

Wendy Hillari Lahope¹, Treesje Runtu , Anneke Wangkar³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, JL. Kampus Bahu, Manado,
95115, Indonesia

E-mail : wendylahope@yahoo.com

ABSTRACT

Internal controls should be supported by the presence of control components which include: control environment, control activities, risk assessment, information and communication, and monitoring. All of these will support the achievement of internal control objectives. The purpose of this study is to determine whether the internal control system on the provision and repayment of receivables at the Cooperative Employees (KPN) Bahtera Bitung is in accordance with the theory of COSO. The method used is descriptive method. Based on the results of research conducted by researchers, it can be concluded that the internal control system in the cooperative is still less effective, due to the absence of division of tasks or the granting of authority and responsibility, and bad debts are still common in the Employees Cooperative (KPN) Bahtera Bitung.

Keywords : Internal Control System, Accounts Receivable.

1. PENDAHULUAN

Penjualan kredit dan kegiatan simpan pinjam merupakan aktivitas pokok dalam koperasi dan merupakan salah satu sumber bagi koperasi untuk mendapatkan *profit*. Sedangkan pelunasan piutang (penerimaan piutang) merupakan sumber bagi tersedianya modal kerja dan merupakan unsur yang paling penting bagi koperasi. Sehingga, kelancaran pelunasan piutang merupakan hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi kegiatan usaha suatu koperasi. Apabila pengelolaan kurang baik, maka koperasi akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, koperasi memerlukan penanganan yang lebih baik terhadap piutang.

Dalam koperasi, perlu adanya pengendalian internal. Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan analisa atas seluruh aktivitas perusahaan. Tujuan utama pengendalian internal pada pemberian kredit adalah untuk mengarahkan kegiatan pemberian kredit agar dapat mengurangi terjadinya kegagalan perkreditan dan mengurangi kredit macet.

Salah satu koperasi yang di dalamnya terdapat kegiatan simpan pinjam yang dapat menimbulkan piutang adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung beralamat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Bitung. Jl. Ir. Soekarno No. 14 Bitung. Koperasi Pegawai Negeri Bahtera mempunyai anggota aktif sebanyak 117 orang. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung mempunyai 2 kegiatan usaha yaitu Unit Simpan Pinjam (USP) dan Unit Usaha Dagang (UUD). Unit Usaha Dagang menyediakan produk kebutuhan anggota dan masyarakat, antara lain: sewa billiard, penjualan tiket, id card, penjualan sembako dan warseda.

Setelah memahami tentang sistem pengendalian internal pemberian dan pelunasan piutang, maka berikut ini beberapa permasalahan yang terdapat pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung. Permasalahan pertama yaitu tidak adanya garis wewenang dan tanggung jawab secara jelas pada masing-masing fungsi, dengan kata lain terjadi rangkap

tugas. Di mana manajer Unit Simpan Pinjam (USP) dan bendahara dilakukan oleh orang yang sama. Permasalahan kedua yaitu kredit macet masih sering terjadi di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketelitian manajer Unit Simpan Pinjam (USP) dalam menganalisis kredit yang diberikan. Dalam memberikan pinjaman, manajer Unit Simpan Pinjam (USP) hanya melihat dari sikap debitur saja, tanpa memperhatikan sepenuhnya prinsip 5C dalam pemberian kredit.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:221), sebagaimana dikutip dalam Befilla (2017:3), pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan.

2.2. Komponen Pengendalian Internal

Arya (2016:4-5) komponen pengendalian internal model COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) meliputi hal-hal berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah faktor-faktor yang meliputi integritas, nilai-nilai etika, dan komitmen terhadap kompetisi, filosofi dan gaya manajemen, cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, perhatian dan arahan yang dilakukan oleh pimpinan, struktur organisasi, dan partisipasi dewan direksi.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dalam pengendalian internal adalah usaha manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi diperlukan pada tiap level di dalam organisasi. Informasi dan komunikasi akan mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengelola dan mengendalikan kegiatan organisasi.

5. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu.

2.3. Pengertian Piutang

Menurut Sudarwanto (2013:217) piutang adalah suatu tagihan yang tidak disertai janji tertulis, dan timbul karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit, serta memiliki masa atau tanggal jatuh tempo dengan jumlah tertentu sesuai dengan nilai saat terjadinya transaksi. Jadi, piutang sesuatu transaksi akan menimbulkan piutang dengan ketentuan :

1. Transaksi timbul sebagai suatu peristiwa masa lalu

2. Merupakan transaksi yang bersifat non tunai

3. Memiliki tanggal jatuh tempo

4. Ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab untuk melunasi pada saat jatuh tempo.

Sudarwanto (2013:217) mengatakan bahwa dalam koperasi piutang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Piutang Anggota

Piutang ini timbul karena adanya penjualan barang/jasa kepada anggota secara kredit, dan akan dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun. Oleh karena itu, piutang anggota ini dikelompokkan ke dalam aktiva lancar.

2. Piutang Karyawan

Piutang karyawan merupakan tagihan koperasi kepada karyawan dan biasanya pembayarannya melalui pemotongan gaji tiap-tiap bulan.

3. Piutang Bukan Anggota

Piutang ini timbul karena koperasi melakukan transaksi penjualan secara kredit kepada non anggota koperasi. Kelompok piutang ini termasuk piutang usaha dan piutang non usaha.

2.4. Metode Pencatatan Piutang

Kiki (2012) menyatakan bahwa pencatatan piutang dilakukan oleh petugas bagian kartu piutang, dan petugas bagian jurnal, dan buku besar. Buku-buku yang diperlukan terdiri atas buku jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, buku besar, dan kartu piutang sebagai buku pembantu.

2.5. Penghapusan Piutang Tak Tertagih

Menurut Wadiyo (2016) Penghapusan piutang adalah kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Sedangkan menurut Sudarwanto (2013:219) piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi, maka akan dihapuskan dalam buku besar piutang akan tetapi tidak menghapuskan hak penagihan. Untuk melakukan penghapusan piutang digunakan metode :

1. Metode langsung
2. Metode cadangan

2.6. Pengendalian Internal Piutang

Menurut Hery (2014:206), sebagaimana dikutip dalam Natalia (2015:4), kalau kita berbicara mengenai pengendalian internal atas piutang usaha, maka sesungguhnya yang menjadi pusat perhatian kita adalah bagaimana pengamanan yang efisien dan efektif dilakukan atas piutang usaha, baik dari segi pengamanan atas perolehan fisik kas, pemisahan tugas (termasuk masalah otorisasi persetujuan kredit), sampai pada tersedianya data catatan akuntansi yang akurat.

2.7. Prinsip-Prinsip Koperasi Di Indonesia

Menurut Sudarwanto (2013:21) koperasi memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman perilaku anggota dalam menjalankan aktivitas usahanya. Prinsip-prinsip koperasidalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yaitu :

1. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka
Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan oleh pihak maupun untuk menjadi anggota koperasi.
2. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis
Prinsip ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan senantiasa melibatkan anggota koperasi. Pengaturannya diatur dalam anggaran dasar/rumah tangga koperasi.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Sebanding dengan Partisipasi Anggota
Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan partisipasi anggota koperasi dalam membentuk kontribusi sisa hasil usaha selama periode akuntansi. Dengan demikian, pendapatan anggota koperasi dari pembagian hasil usaha sangat tergantung dari partisipasi anggota dalam memberikan kontribusi pembentukan sisa hasil usaha bagi koperasi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. (Srikandi, 2017). Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna. (Nanang, 2016). Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Sumber data primer. Menurut Ainur (2016) sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer, yakni penuturan atau catatan para saksi mata.
2. Sumber data sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. (Ainur, 2016).

3.2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Di mana penulis akan melakukan kegiatan menganalisis sistem pengendalian internal terhadap pemberian dan pelunasan piutang pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan pada saat observasi dan wawancara. Analisis ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang gambaran secara menyeluruh mengenai koperasi sehingga dapat diketahui permasalahan yang terjadi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung yang berkaitan langsung dengan aktivitas pemberian dan penulisan piutang pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung, dan hasil analisis akan dibandingkan dengan teori pengendalian internal menurut COSO, apakah sistem pengendalian internal terhadap pemberian dan pelunasan piutang yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung sudah sesuai atau tidak dengan teori pengendalian yang diterapkan oleh COSO.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis

Sesuai dengan data diperoleh dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung. Berikut ini merupakan hasil penelitian yang di dapatkan penulis :

1. Prosedur Pengajuan Kredit
Prosedur pengajuan kredit yang ditetapkan koperasi adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit ke bendahara, setelah itu bendahara memberikan formulir permohonan kredit. Formulir tersebut wajib diisi dan dilengkapi oleh pemohon yang ingin meminjam kredit di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung.
 - b. Setelah itu pemohon menyerahkan formulir yang sudah diisi kepada bendahara. Bendahara menyerahkan formulir tersebut ke manajer Unit Simpan Pinjam (USP), manajer Unit Simpan Pinjam (USP) akan melakukan evaluasi terkait kelayakan kredit pemohon. Apakah tukin (Tunjangan Kinerja) pemohon dapat dipotong, apakah pemohon masih memiliki tanggungan atau tidak.
 - c. Jika tukin (Tunjangan Kinerja) pemohon dapat di potong, maka kredit akan langsung disetujui oleh Manajer Unit Simpan Pinjam.
 - d. Setelah disetujui, pemohon kredit dapat mencairkan uang di koperasi.
2. Prosedur Penagihan/Pelunasan Kredit
Setiap bulannya Tukin (Tunjangan Kinerja) anggota yang meminjam kredit dipotong sebesar angsuran pokok kredit. Selanjutnya bagian keuangan dan kepegawaian/bendahara menyerahkan ke bagian simpan pinjam selambat-lambatnya

10 bulan dari tukin yang dipotong dengan bunga 3% per bulan. Apabila terjadi kasus tukin anggota tidak mencukupi untuk dipotong sebesar angsuran kredit. Maka anggota pemohon harus menyerahkan setoran langsung ke Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung. Waktu yang diberikan oleh koperasi untuk melunasi kredit yaitu 20 bulan. Apabila pemohon terlambat menyetor uang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka akan diumumkan langsung di apel pagi, jika pemohon tetap terlambat membayar/tidak ingin menyetor langsung ke koperasi maka pemohon harus membayar 2 kali dari sisa kredit sebelumnya.

3. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan untuk mengajukan pinjaman pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung adalah Formulir Permohonan Kredit. Formulir ini harus diisi oleh anggota yang ingin meminjam kredit pada koperasi. Formulir ini berisi nama calon debitur, status pegawai, total gaji yang diterima, total pinjaman, banyaknya angsuran, total potongan tiap bulan, total gaji yang diterima bersih masuk rekening, di potong dari uang Tukin (jika gaji tidak mencukupi), pembayaran langsung dari anggota jika gaji dan tukin tidak mencukupi.

4. Catatan yang Digunakan

Catatan yang digunakan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung adalah sebagai berikut :

- a. Buku kas adalah buku untuk mencatat dan mengetahui jumlah-jumlah yang diterima dan dikeluarkan.
- b. Aliran kas adalah pencatatan kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran pada tahun berjalan.
- c. Neraca digunakan untuk mengetahui jumlah aset dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung. Di mana neraca ini selalu dimunculkan dalam buku RAT.
- d. Laporan Laba Rugi di gunakan untuk mengetahui jumlah laba pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung. Di mana laporan laba rugi ini selalu dimunculkan dalam buku RAT.

4.2. Pembahasan

Comittee of sponsoring organizations of the treadway commision atau COSO menyebutkan bahwa ada lima komponen dalam COSO yang digunakan untuk menilai apakah pengendalian internal yang ada sudah efektif atau belum. Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal terhadap pemberian dan pelunasan piutang pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung berdasarkan lima komponen sistem pengendalian internal yang diperoleh dari hasil wawancara yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah faktor-faktor yang meliputi integritas, nilai-nilai etika, dan komitmen terhadap kompetisi, filosofi dan gaya manajemen, cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, perhatian dan arahan yang dilakukan oleh pimpinan, struktur organisasi, dan partisipasi dewan direksi. Pelaksanaan pengendalian internal yang terkait lingkungan pengendalian di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung belum terlaksana dengan baik dijelaskan sebagai berikut :

a. Integritas dan Nilai Etika

Dalam hal ini Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung telah menerapkan nilai integritas dan etika dengan baik hal ini dapat dilihat dari kejujuran pengurus dalam melakukan pencatatan transaksi kredit, dan memiliki motivasi giat dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan. Bagi karyawan yang tidak

melaksanakan tugasnya dengan baik akan dikenakan sanksi (*punishment*) seperti teguran.

b. Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan panduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung telah menerapkan dengan jelas mengenai pekerjaan dan latar belakang pendidikan juga dibutuhkan pada koperasi. Akan tetapi, ada beberapa pengurus yang ditempatkan dibagian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pihak manajemen menjelaskan bahwa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung yakin ketidaksesuaian latar belakang pendidikan tidak menjadi masalah sebab dengan *training* awal dan lamanya masa kerja akan menjadikan karyawan semakin terampil meskipun latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya.

c. Filosofi dan Gaya Operasi

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung telah menunjukkan adanya pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian kredit yang mengutamakan pelayanan terhadap nasabah sehingga nasabah merasa nyaman terhadap pelayanan yang diberikan.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan Struktur organisasi menentukan garis-garis tanggung jawab dan kewenangan yang ada. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung memiliki struktur organisasi yang menerangkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi semua direksi maupun karyawan. Namun, struktur organisasi di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung masih belum berjalan dengan efektif, hal ini dikarenakan terjadinya rangkap tugas di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung. Di mana manajer USP dan bendahara dilakukan oleh orang yang sama. Dengan adanya penggabungan tugas tersebut dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga data yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya, kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.

e. Keterlibatan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas atau Komite Audit merupakan dewan yang bertugas dan berfungsi membantu Dewan Pembina atau Dewan Komisaris untuk mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan, audit laporan keuangan dan pengendalian internal serta fungsi-fungsi audit. Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung terdapat badan pengawas. Badan pengawas bertugas untuk pengauditan internal/mengaudit laporan keuangan.

f. Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam kebijakan dan praktik sumber daya Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung memberikan pelatihan pendidikan yang sering diikuti oleh pengurus dan pelaksana koperasi, agar keterampilan yang dimiliki oleh setiap karyawan berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan yang semakin luas. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung telah memberikan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Setiap organisasi atau perusahaan tentunya akan menghadapi berbagai risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuannya, baik risiko yang berasal dari eksternal perusahaan maupun risiko yang berasal dari internal perusahaan. Risiko ini terkait dengan penetapan tujuan-tujuan yang ingin dicapai organisasi, yaitu efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung menghadapi risiko internal yaitu kredit macet masih sering terjadi di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketelitian manajer Unit Simpan Pinjam (USP) dalam menganalisis kredit yang diberikan. Manajer hanya melihat dari sikap debitur saja, tanpa memperhatikan sepenuhnya prinsip 5C dalam pemberian kredit.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung dalam kaitannya dengan pemberian kredit adalah :

a. Prosedur Pemberian Kredit

Di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung, setiap karyawan yang terdaftar sebagai anggota yang dapat melakukan pinjaman kredit kepada koperasi dengan bunga sebesar 3% per bulan dan pemberian kredit hanya diberikan otorisasi oleh pejabat yang berwenang.

b. Sistem Otorisasi dan Pencatatan

Dalam proses pembayaran dan pelunasan piutang dokumen yang digunakan adalah bukti kas masuk dan kas keluar dan setiap dokumen yang ada telah mendapatkan otorisasi dari pengurus koperasi

c. Penyimpanan dan Pemeliharaan File Anggota

Penyimpanan dan pemeliharaan file anggota yang melakukan piutang dilakukan oleh bagian simpan pinjam. Dimana penyimpanan file anggota di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung sudah menggunakan sistem terkomputerisasi. File anggota disimpan berdasarkan nama keanggotannya.

d. Pengendalian Hak Akses

Yang dapat melakukan akses atas data dari anggota yang melakukan piutang hanya operator bagian simpan pinjam saja dan untuk masuk dalam program, operator unit pinjaman harus memasukkan *password* terlebih dahulu.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi diperlukan pada tiap level di dalam organisasi. Informasi dan komunikasi akan mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengelola dan mengendalikan kegiatan organisasi. Pengendalian internal pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung dalam hal informasi dan komunikasi mengenai data anggota yang melakukan pinjaman akan dicatat dan disimpan dikomputer oleh bagian simpan pinjam dan informasi piutang anggota dapat diperoleh dengan cepat sehingga membantu bagian penagihan untuk melakukan *follow up* terhadap anggota yang terlewat dari jatuh tempo pembayaran.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan merupakan proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Dalam hal pemantauan terhadap pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan koperasi selalu melakukan pemantauan kreditnya setiap bulan, jika ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan, karyawan akan segera melaporkan langsung kekurangan yang terjadi itu, sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal pada koperasi belum berjalan dengan efektif. Adapun masalah yang terjadi di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung :

1. Tidak terdapatnya pembagian tugas atau pemberian wewenang dan tanggung jawab. Hal ini dikarenakan terjadi rangkap tugas di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung. Di mana manajer USP (Unit Simpan Pinjam) dan bendahara dilakukan oleh orang yang sama.
2. Kredit macet masih sering terjadi di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketelitian manajer Unit Simpan Pinjam (USP) dalam menganalisis kredit yang diberikan. Manajer hanya melihat dari sikap debitur saja, tanpa memperhatikan sepenuhnya prinsip 5C dalam pemberian kredit.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Bahtera Bitung, maka peneliti memberikan saran yang bermaksud untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha koperasi. Beberapa saran yang dapat diberikan peneliti di antaranya :

1. Sebaiknya, koperasi perlu menambah jumlah personil/pengurus untuk menghindari terjadinya perangkap tugas dimana setiap bagian bertanggung jawab atas bagiannya masing-masing.
2. Sebaiknya, dalam memberikan kredit kepada anggota, manajer Unit Simpan Pinjam (USP) harus lebih teliti lagi dalam menganalisis kredit dan lebih memperhatikan prinsip 5C, agar kredit macet dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abednego Ketaren. 2014. Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Surya Pelita. Skripsi. STIE Bina Karya Tebing Tinggi.
- Ainur, Rohmah. 2016. Definisi sumber data dan teknik pengumpulan data serta penjelasan sumber data primer dan sekunder dalam penelitian. [http://ainurrohmahwalisongo.blogspot.co.id/2016/11/definisi sumber data dan teknik_27.html](http://ainurrohmahwalisongo.blogspot.co.id/2016/11/definisi_sumber_data_dan_teknik_27.html). Diakses pada tanggal 27 April 2018.
- Arya, Pratama Dera. 2016. Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Piutang dan Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada PT. Surya Wenang Indah Manado. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Emba. Vol. 4. Hal. 1498-1508.
- Befilla, Astika Putri. 2017. Analisis Pengendalian Intern Pada Sistem dan Prosedur Pemberian dan Pelunasan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Petani. Universitas Brawijaya. Vol. 50. No. 1 September 2017.
- Herlina, Vanessa Vitaradiaz. 2013. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penjualan Kredit Pada KPRI Universitas Brawijaya Malang. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Kiki, Riyanti. 2012. Metode Pencatatan Piutang. <http://akuntansiku46.blogspot.co.id/2012/10/metode-pencatatan-piutang.html> Diakses pada tanggal 24 Februari 2018.
- Nanang, Budiutomo. 2016. Metode Penelitian Kualitatif beserta Contoh Judul dan Contoh Proposal Lengkap. <https://bukubiruku.com/metode-penelitian-kualitatif/> Diakses pada tanggal 6 Februari 2018.

- Natalia, Nur Afifah. 2015. Analisis Pengendalian Internal Atas Piutang Pada PT. Gis. Jurnal Spirit Pro Patria. Vol. 1.
- Srikandi, Rahayu. 2017. Pengertian Penelitian Deskriptif serta Tujuannya <http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-penelitian-deskriptif-serta-tujuannya.html> Diakses pada tanggal 6 Februari 2018.
- Sudarwanto, Adenk. 2013. Akuntansi Koperasi, Pendekatan Praktis Penyusunan Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Wadiyo. 2016. Metode Penghapusan Piutang Tak Tertagih dan Pencatatan Akuntansinya. <https://manajemenkeuangan.net/bila-piutang-anda-sulit-ditagih-inilah-2-metode-penghapusan-piutang-tak-tertagih-dan-pencatatan-akuntansinya/> Diakses pada tanggal 24 Februari 2018.
- Yuliatwati, Puspitaningrum. 2016. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Kediri Tahun 2014-2015. Skripsi. Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri